



Analisis implementasi *internal control* dalam sistem akuntansi piutang

Sukmahadi¹, Resa Sifa Nurfarizah²

^{1,2}Institut Manajemen Koperasi Indonesia

¹sukmadjoe@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Oktober 2021

Disetujui 14 November

2022

Diterbitkan 25 Desember

2022

Kata kunci:

Pengendalian, Piutang; Koperasi; Pengendalian internal; Sistem akuntansi piutang

Keywords :

Controlling; Account receivable; Cooperative; Internal control; Accounts receivable accounting system

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi internal control dalam sistem akuntansi piutang pada koperasi SADAR Sistem akuntansi piutang adalah sistem yang menangani transaksi- transaksi yang berhubungan dengan piutang. Piutang dalam neraca adalah unsur yang penting dan memerlukan kebijakan yang baik dari manajemen dalam pengelolaannya. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah Menangani bagaimana sistem akuntansi piutang dari KPRI SADAR Pangalengan yang meliputi apa saja fungsi yang terkait, apa saja dokumen yang digunakan, apa saja catatan akuntansi yang digunakan dan bagaimana pengendalian internnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang serta pengendalian intern dalam sistem akuntansi piutang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi piutang pada KPRI SADAR Pangalengan sudah cukup baik namun terdapat kelemahan- kelemahan pada prosedurnya dimana belum melibatkan fungsi piutang untuk membantu kelancaran dalam pencatatan piutang dan pengendalian internal pada akuntansi piutang yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia sudah cukup baik dan telah memenuhi sistem pengendalian internal.

ABSTRACT

This research implementation the internal control account receivables. accounting system is a system that handles transactions related to receivables. Receivables in the balance sheet are an important element and require good policy from management in its management. The research studied in this study is handling how the accounting system of receivables from KPRI SADAR Pangalengan which includes what are the related functions, what are the documents used, what accounting records are used and how to control the internal. The purpose of this research is to find out the related functions, documents used, accounting records used, procedures that form the receivables accounting system as well as internal control in the receivables accounting system. The results of the study can be concluded that the accounting system of receivables in KPRI SADAR Pangalengan is good enough but there are weaknesses in the procedure which has not involved the function of receivables to help smooth recording of receivables.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Peningkatan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi dan peranan koperasi secara makro adalah berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru; serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Definisi koperasi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.” Tamba (2004) menyatakan berdasarkan jenis usahanya koperasi dibedakan menjadi empat yaitu: koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha operasi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat umumnya serta meningkatkan sisa hasil usaha koperasi.

Diantara banyaknya jenis koperasi, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang sangat berkembang pada saat ini, banyak koperasi simpan pinjam yang bermunculan hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 15/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Kegiatan Usaha Simpan Pinjam meliputi menghimpun simpanan dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Dilihat dari tingkat dan luas daerah kerjanya Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

Koperasi KPRI SADAR merupakan koperasi primer yang memiliki anggota 237 orang. Wilayah koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan atau desa. Sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk koperasi-koperasi dan memiliki cakupan kerja yang luas. Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan maka dari itu cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Koperasi juga terbagi menjadi dua yaitu koperasi single purpose dan multi purpose. Single purpose yaitu koperasi yang kegiatannya hanya ada satu bidang usaha saja sedangkan multi purpose yaitu koperasi yang kegiatannya banyak berbagai jenis usaha. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius (KPRI SADAR). Koperasi termasuk kedalam koperasi primer merupakan koperasi single purpose beraktivitas sebagai kopersisimpan pinjam.

KPRI SADAR terletak di Pangalengan Jawa Barat yang anggotanya berprofesi sebagai pegawai negeri (guru). Tujuan koperasi ini yaitu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi anggotanya. Koperasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota dalam memenuhi kebutuhan dana. Koperasi KPRI SADAR salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, yang sebagian penjualannya dilakukan secara kredit berarti perusahaan mengadakan piutang. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan sistem akuntansi piutang yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada saat rapat anggota. Mengingat piutang merupakan modal kerja yang diharapkan dapat memperoleh tambahan penghasilan dan laba, maka kehadiran piutang memerlukan analisis yang cukup mendalam karena dimungkinkan perkiraan piutang membutuhkan investasi yang cukup besar dan mengandung resiko yang cukup besar dan dapat merugikan perusahaan.

Oleh karena itu, manajemen piutang memiliki peranan yang sangat penting di dalam koperasi dalam kaitannya terhadap penilaian piutang, pencatatan piutang dan prosedur piutang sehingga dapat memberikan gambaran tentang untung ruginya dilaksanakan penjualan usaha secara piutang. Efektivitas pengelolaan piutang diperlukan pada perusahaan yang tercermin dari jumlah piutang dan tingkat perputaran piutang yang dapat mengantisipasi, memperkecil bahkan menghilangkan resiko yang mungkin akan terjadi dari piutang. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) memiliki anggota sebanyak 237. Dengan jumlah anggota koperasi yang cukup banyak maka KPRI SADAR memerlukan sistem akuntansi piutang untuk mengetahui jumlah piutang dan pengelolaan piutang yang baik, terutama pada salah satu bidang usaha yang bergerak dalam simpan pinjam anggota.

Dalam hal ini sistem akuntansi piutang perlu diteliti untuk mengetahui apakah prosedur sudah sesuai dengan ketentuan, apakah dokumen, fungsi dan catatan akuntansi yang diinginkan sebagai alat pengawasan oleh manajemen sudah efektif dalam pengendalian terhadap piutang. Apakah fungsi yang terkait diantara fungsi kas terpisah dari fungsi akuntansi sehingga fungsi yang terpisah dapat saling mengoreksi dan dapat berperan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tidak ada kesalahan dalam mengelola piutang yang timbul di koperasi. Namun pada kenyataannya KPRI SADAR Pangalengan belum sepenuhnya melakukan pemisahan fungsi, yaitu fungsi kas dan fungsi akuntansi dilakukan oleh satu orang, sehingga keadaan ini kurang baik adanya karena belum sesuai dengan teori akuntansi atau dasar-dasar akuntansi piutang.

Sistem akuntansi piutang memanglah sangat penting bagi instansi/perusahaan, terlebih lagi bagi koperasi. KPRI SADAR Pangalengan memiliki sistem akuntansi piutang yang cukup baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang ini sebenarnya adalah merupakan hal yang membahas atau mengenai fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, unsur pengendalian intern, dan prosedur yang membentuk sistem akuntansi piutang pada perusahaan/instansi tersebut. Berdasarkan beberapa unsur tersebut dapat ketentuan yang harus diterapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan tersebut. KPRI SADAR Pangalengan terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kelemahan penerapan SPI tersebut terletak pada perangkapan fungsi yang terkait merupakan bagian dalam organisasi unsur pengendalian intern. Dalam Sistem Pengendalian Internal salah satu ketentuan yang tidak dipenuhi dalam sistem

pengendalian internal koperasi ini yaitu adanya perangkapan fungsi pencatatan (akuntansi) dan penguasaan (penerimaan) uang. Pelaksanaan tersebut adalah dilaksanakannya fungsi akuntansi dan fungsi kas dipegang oleh orang yang sama. Kesalahan ini menjadi fatal, karena dapat menimbulkan kecurangan yang berpotensi merugikan koperasi.

Tabel 1 Data jumlah piutang yang bermasalah di KPRI SADAR Pangalengan

Tahun	Anggota peminjam (orang)	Piutang pinjaman yang disalurkan (Rp)	Pinjaman bermasalah (Rp)	Persentase (%)
2016	283	6.584.114.469	744.008.324	11,3
2017	268	7.031.432.573	1.560.274.887	22,19
2018	256	7.247.909.868	2.239.604.148	30,9
2019	210	7.325.638.803	1.155.619.521	15,77
2020	237	7.487.056.106	1.669.613.510	22,3

Sumber : Rapat Anggota Tahunan 2016-2020

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa piutang bermasalah setiap tahunnya meningkat disebabkan pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik dilarenakan sistem akuntansi yang diterapkan koperasi tidak memadai atau adanya ketidak patuhan dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya piutang bermasalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2008) dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari metode yang digunakan partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Creswell mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai *Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through words or pictures*. Penelitian dalam definisi ini adalah bahwa peneliti haruslah tertarik pada proses, pemaknaan dan pemahaman yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kata dan gambar. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data atau gejala yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui sistem akuntansi piutang dan pengendalian internal yang diterapkan oleh KPRI SADAR Pangalengan telah sesuai dengan pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan RAT tahunan (Laporan Rapat Anggota Tahunan), laporan keuangan. Kemudian diperlukan juga data kualitatif berupa Bagan sistem akuntansi KPRI SADAR Pangalengan, Struktur Organisasi KPRI SADAR Pangalengan, catatan akuntansi apa saja yang digunakan, dokumen yang tersedia, dan data-data lain yang berguna pada saat proses penelitian berlangsung.

Berdasarkan uraian pendekatan masalah dengan memperhatikan kebutuhan data, penelitian ini akan melibatkan pengertian skala likert menurut sugiyono merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kondisi. Skala presentase nilai

81 - 100 % kriteria SB = Sangat Baik

61 - 80 % kriteria B = Baik

41 - 60 % kriteria CB = Cukup Baik

21 - 40 % kriteria KB = Kurang Baik

0 - 20 % kriteria SKB = Sangat Kurang Baik

Metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang penggunaannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan menganalisis hal-hal yang dapat dianalisa bukan dengan angka-angka tetapi dengan

teori-teori yang dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini yang akan dianalisa adalah mengenai Sistem Akuntansi Piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis dan Religius Pangalengan. Analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Pada dasarnya proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber data. Peneliti membuat langkahlangkah pengolahan data dengan membuat kategori-kategori atas informasi yang diperoleh (open coding), memilih salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis (axial coding), lalu merangkai sebuah cerita dari hubungan antar kategori (selective coding). Creswell (2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pengendalian internal control pada koperasi mengenai internal kontrol piutang, hasil dari jawaban dan konfirmasi dengan responden sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Kuesioner

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Apakah buku besar pembantu piutang secara periodik dicocokkan dengan rekening control?	X		
2	Apakah secara periodik membuat skedul umur piutang?	X		
3	Apakah piutang ragu- ragu secara periodik di periksa oleh petugas?	X		
4	Apakah rekening cadangan piutang ragu- ragu dibuat?	X		
5	Apakah penghapusan piutang yang tidak tertagih disetujui?	X		
6	Setelah piutang yang tidak tertagih dihapus, apakah pengawasan dilakukan?		X	
7	Apakah jurnal penyesuaian disetujui?	X		
8	Apakah kredit memo diberi nomor urut?	X		
9	Apakah semua kredit memo di pertanggungjawabkan?	X		
10	Apakah laporan bulanan di kirim kesemua anggota?		X	
11	Apakah laporan dikirim pelaksana tugas?		X	
12	Apakah laporan selalu diperiksa?	X		
13	Apakah konfirmasi saldo piutang?	X		
14	Apakah bagian kredit dipisahkan dengan bagian pencatatan piutang?	X		
15	Apakah piutang anggota debitur yang terdapat selisih ditangani oleh orang selain kasir atau bagian piutang?	X		
16	Apakah potongan yang luar biasa dan pencadangannya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab(bendahara)?	X		
17	Apakah tugas bagian piutang dipisahkan dari fungsi penerimaan dan pengeluaran kas?		X	Ini merupakan kelemahan dari SPI
18	Untuk membayar rekening piutang yang bersaldo kredit apakah perlu disetujui oleh orang yang berwenang?	X		
19	Apakah karyawan di bagian piutang diadakan rotasi jabatan pada periodik tertentu?		X	
20	Apakah bagian penagihan melakukan verifikasi pekerjaan di bagian piutang?	X		
21	Apakah di bagian kredit, yang menyetujui syarat syarat kredit dan batasannya, mempunyai hubungan dengan: Pencatat Piutang?	X		
22	Apakah terdapat batas pemberian kredit?	X		

Dari sebanyak 22 pertanyaan yang jawabannya ya sebanyak 17 pertanyaan ,prosentase 77,27%, dan yang jawaban tidak sebanyak 5, adalah 22.73%, jadi dengan nilai 77,18%, dari total (100%) nilai ini berada diantara rentang 81 – 100 % maka Kriteria pengendalian piutang adalah Baik. Kelemahan internal control piutang yaitu adanya rangkap tugas yaitu kasir merangkap sebagai tenaga akuntansi, rotasi pegawai tidak dilakukan secara berkala, pengawas terhadap piutang yang dihapuskan tidak dilakukan pengawasan, dan pihak anggota debitur tidak diberi laporan. Penentuan persentase Pelaksanaan pengendalian internal pada KPRI SADAR Pangalengan berdasarkan pada unsur – unsur

pokok pengendalian internal menurut COSO adalah lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, prosedur otorisasi yang memadai, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Koperasi telah memiliki struktur organisasi yang baik dan secara umum bertujuan untuk memisahkan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam setiap fungsi atau bagian yang ada dalam pencapaian tujuan koperasi. Pada koperasi belum ada bagian khusus untuk menganalisis layak tidaknya anggota koperasi untuk mendapatkan pinjaman, karena sampai saat ini setiap anggota yang mengajukan pinjaman selalu disetujui tanpa mempertimbangkan histori pinjaman anggota sebelumnya tetapi dengan catatan. Dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman, integritas dan nilai etika pengurus alur prosedur pengajuan hingga pencairan pinjaman pada koperasi yang disetujui oleh pengurus koperasi proses mengisi formulir pinjaman kredit (yang telah diotorisasi pihak terkait) memeriksa formulir terima konfirmasi dari konfirmasi pengurus koperasi pencairan dana penolakan disetujui hasil disetujui tidak disetujui ditolak (diotorisasi pihak2 terkait) koperasi cukup baik. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya pihak manajemen koperasi tidak menyediakan program sistem keuangan yang otomatis, semua data diinput secara manual di Microsoft Excel. Sehingga sedikit menghambat dan memperlambat manajemen melakukan pengendalian intern. Selain itu juga jarang adanya pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh komite audit pada koperasi yang menyebabkan kurang adanya kontrol terhadap laporan – laporan keuangan dan kinerja koperasi, sehingga menjadikan pengendalian intern pada koperasi kurang efektif. KPRI SADAR Pangalengan menjunjung tinggi integritas dan kompetensi. Masing – masing pengurus saling bekerjasama sistem bagi karyawan yang diterapkan oleh koperasi merupakan salah satu upaya manajemen mendorong terciptanya SDM yang baik yang bertujuan meningkatkan kinerja koperasi.

Penentuan Risiko (*Risk Assessment*)

Risiko selalu ada disetiap organisasi karena didalamnya terdapat banyak perbedaan karakter, pemikiran dan lain sebagainya. Namun, tentu koperasi mempunyai strategi untuk mengidentifikasi, mengelola dan mengevaluasi risiko – risiko tersebut dengan adanya pelaksanaan pengendalian internal dan kerjasama yang baik antara pengurus dan anggota yang diterapkan di dalam operasi, sehingga koperasi tidak akan mengalami risiko yang akan timbul. Mencegah atau meminimalkan masalah – masalah pinjaman sebagai akibat adanya risiko pemberian pinjaman, maka dilakukan penaksiran risiko pada koperasi, diantaranya adalah dalam pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar yang dibuat manual oleh kasir diserahkan kepada bendahara untuk dikomputerisasi, agar dalam pembuatan laporan keuangan risiko kesalahan menghitung relative kecil meskipun masih terdapatnya human error. Pembuatan laporan keuangan bulanan maupun tahunan yang dibuat oleh bendahara dan sekretaris dicetak dan diotorisasi oleh bagian – bagian terkait serta untuk saling mengoreksi. Untuk pengurus koperasi yang akan mengambil cuti, sekurang – kurangnya satu bulan sebelum cuti mengajarkan atau menyerahkan pekerjaan yang sehari – harinya dikerjakan kepada pengurus yang lain, sehingga kegiatan koperasi tidak mengalami hambatan.

Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen koperasi telah dilaksanakan. Komponen – komponen pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendaliannya diantaranya yaitu pemisahan tugas dan pengendalian pemrosesan informasi. Pemisahan tugas merupakan pendukung dari terciptanya pengendalian internal yang baik, dengan adanya sahan tugas pada struktur organisasi dapat membedakan antara tugas, tanggung jawab dan wewenang pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus. Secara tertulis struktur organisasi KPRI SADAR Pangalengan harus ditambahkan 1 orang agar fungsi kas dan fungsi akuntansi dilakukan dengan orang yang berbeda.

Kemudian dengan adanya pengendalian pemrosesan informasi maka koperasi dapat mengontrol semua kejadian yang terjadi dalam koperasi. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa koperasi tidak memiliki sistem khusus keuangan untuk koperasi, tetapi masih menggunakan Microsoft excel untuk mengkomputerisasikan data dan keuangan koperasi, Sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan lebih cepat karena masih menggunakan Microsoft excel dan data perhitungan belum bisa dipastikan kebenarannya karena jika salah menginput data hasil akan berbeda atau hasil

kurang akurat. Berikut ini adalah hal – hal yang dapat menunjang pengendalian internalnya, yaitu: Semua data koperasi yang dianggap rahasia dan penting diberikan password dan review atas kinerja sehingga meningkatkan kinerja para karyawan atau pengurus koperasi serta harus diadakan evaluasi secara berkala yang berguna untuk kemajuan dan kelancaran koperasi.

Prosedur otorisasi yang memadai

Prosedur otorisasi yang memadai dalam koperasi sangat diperlukan untuk mendukung pengesahan dokumen – dokumen yang mendukung jalannya dalam pemberian kredit serta mendukung pengendalian internalnya. Berdasarkan wawancara dan data yang didapat, koperasi telah memiliki prosedur otorisasi yang jelas, sehingga dapat mendukung pengendalian internalnya, hal ini dapat dilihat dimana semua dokumen telah diotorisasi oleh pengurus atau pihak yang terkait. Formulir pinjaman kredit pada koperasi tidak adanya rangkapan, sehingga bila formulir sudah diarsip oleh pihak koperasi, anggota yang pinjam tidak memiliki rangkapan formulir yang diajukan untuk pinjaman, sehingga sering terjadi selisih paham antara pengurus dan anggota ketika pengurus melakukan penagihan ataupun dalam hal besaran angsuran, banyaknya mengangsur pinjaman, tanggal jatuh tempo dan lain sebagainya. Selain itu juga formulir pengajuan pinjaman tidak menggunakan nomer urut, baik manual maupun tercetak, yang menyebabkan antrian pencairan pinjaman tidak teratur. Anggota yang lebih dahulu mengajukan formulir yang telah disetujui mendapatkan pencairan dana bisa jadi belakangan, dan sebaliknya yang mengajukan formulir belakangan bisa jadi mendapatkan pencairan dana lebih awal.

Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi terjalin dengan baik sesama pengurus koperasi, hal ini diperlukan agar dapat berjalannya suatu kegiatan operasional yang baik dalam koperasi, sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko dalam hal pemberian pinjaman. Informasi dimulai dari *entry data* yang berhubungan dengan anggota dan koperasi. Pertemuan antara pengurus koperasi dengan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan keberadaan rapat anggota dalam koperasi adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian melalui rapat forum, para anggota akan memiliki peluang untuk turut mengarahkan jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus koperasi. Selain untuk membahas kinerja koperasi selama satu tahun, rapat ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik antara pengawas, pengurus dan anggota. Tidak adanya sistem keuangan yang otomatis berisikan informasi yang akurat, tetapi masih menggunakan entry data manual melalui Microsoft excel. Komunikasi yang dilakukan terhadap anggota dilakukan secara langsung ataupun menggunakan alat komunikasi yaitu telepon. Berikut beberapa temuan informasi dan komunikasi yang terdapat pada KPRI SADAR Pangalengan.

Pemantauan (Monitoring)

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung pada koperasi ditemukan beberapa hal diantaranya, tidak adanya pemantauan yang dilakukan oleh pihak pengurus pada dokumen – dokumen yang diotorisasi yang terkait dan berhubungan dengan koperasi. Inilah pentingnya diadakan pemantauan dalam koperasi, agar semua kegiatan operasional koperasi berjalan dengan baik. Formulir yang tersedia di koperasi relatif sudah memadai sebagai dasar penyajian laporan keuangan koperasi, hasil penelitian mengungkapkan seperti di bawah ini :

Tabel 3 Hasil Pemantauan

No	Keterangan	Ada	Tidak
1	Dokumen	X	
	Buku jurnal	X	
	Buku besar	X	
	Neraca Saldo	X	
	Neraca lajur	X	
2	Laporan Keuangan	X	
	Perhitungan Hasil Usaha	X	
	Neraca	X	
	Arus Kas		X
	Perubahan Ekuitas	X	

No	Keterangan	Ada	Tidak
	Catatan Atas Laporan Keuangan	X	

Dalam proses akuntansi diperlukan dokumen sebagai sarana penunjang, hasil penelitian mengungkapkan bahwa dokumen yang digunakan sebagai sarana prose akuntansi cukup lengkap. Mulai dari bukti transaksi, buku jurnal, buku besar beserta buku pembantunya dan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, arus kas tersedia tetapi sebaiknya menggunakan metode langsung. Laporan perubahan modal perlu disusun berdasarkan karakteristik untuk koperasi sesuai Undang-undang RI tentang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Penggunaan istilah catatan atas laporan kelantan perlu dipahami yang mana masih dianggap sebagai penjelasan laporan keuangan, walaupun secara isinya sama tetapi istilah catatan atas laporan keuangan merupakan istilah baku dalam sak etap. Kelengkapan dokumen sangat baik di atas 81%. Sedangkan aspek penyajian di atas antara 61% - 80% kategori baik.

Tabel 4 Hasil Penelitian Atas Prosedur Penyaluran Piutang

No	Keterangan	Ada	Tidak
1	Prosedur persiapan kredit	X	
	Data anggota calon debitur	X	
	Persyaratan 5C	X	
2	Prosedur pelaksanaan pemberian kredit	X	
	Plafon Kredit	X	
	Jumlah Pokok	X	
	Jumlah Cicilan	X	
3	Prosedur setelah pemberian kredit	X	
	Pembinaan		X
	Pengawasan		X

Hal yang menjadi sorotan peneliti adalah prosedu pembinaan dan pengawasan atas kredit yang diterima oleh anggota tidak dilakukan. Kedua langkah ini idealnya harus dillakukan oleh kopersi sebagai antipasi penggunaan pinjaman yang tidak bermanfaat sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal piutang Koperasi KPRI SADAR dilihat dari aspek Sistem pengendaliannya masuk katagori Baik yaitu dengan nilai 77,27%. Perangkapan jabatan dan tidak pernah dilakukan rotasi pegawai ,merupakan kelemahan dari pengendalian internal yang berpotensi terjadinya penyimpangan. Aspek penyajian laporan keuangan di atas 61%-80% kriteria cukup baik. Arus kas belum tersaji secara terperinci,sebaiknya menggunakan pencataan dengan metode langsung, agar dapat menunjukkan saldo harian. Aspek dokumen sangat baik > 81 %, seluruh penunjang sarana dokumen dalam proses akuntansi lengkap. Aspek pemenuhan persyatan dan tahap penyaluaran kredit cukup baik nilai 71,42% kriteria baik. Pembinaan dan pengawasan kepada anggota debitur dalam penggunaan kredit, sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan pinjaman yang tdak terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

- Henda dan Kusnadi. (2011). Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi Jakarta: FEUI
- Hanel Alfred. (2005). Organisasi Koperasi Yogyakarta – Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kasmir. (2011). Pengantar Management Keuangan Jakarta: Rajagrafindo.
- Internasional Cooperative Alliance (ICA). 1995. Manchester Inggris KKB ikopin
- Bambang Hartadi. (2010) Sistem Pengendalian Internal (menurut COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Edisi 3. Yogyakarta: BPFEE.

- Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Rusidi dan Ami Purnamawati. 2016. Metodologi Penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi. Institut Manajemen Koperasi Indonesia: Bandung
- SPAP Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat .
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Erlangga
- Karamoy, Venny; Nangoi, Grace Bernadette. Analisis Piutang Pada Pt. Sucofindo (Persero) Cabang Manado. *Accountability*, 2014, 3.1: 41-55.
- Lorenza, Maria Mila. Sistem Akuntansi Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Senang Hati Sejahtera, 2021.
- Sutarti, S.; Rosita, S. I.; Aisyah, I. S. Tinjauan Sistem Akuntansi Piutang dan Penerimaan Kas pada Koperasi Karyawan PT. Goodyear Tbk. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 2006, 6.2: 110-113. 9798
- Permen KUKM nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sektor Riil
- Permen KUKM nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian. No. 25 Tahun 1992
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan 2016
- Laporan Rapat Anggota (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan 2017
- Laporan Rapat Anggota (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan 2018
- Laporan Rapat Anggota (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan 2019
- Laporan Rapat Anggota (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Selalu Aktif Dinamis Amanah dan Religius Pangalengan 2020